ISSN 1907-9419
Vol. 8, No. 3, September 2013

Jurnal Kepariwisataan Indonesia

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan

Terakreditasi LIPI No. 487/AU2/P2MI-LIPI.08/2012

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
Badan Pengembangan Sumber Daya
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

©Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

ISSN : 1907-9419

JURNAL KEPARIWISATAAN INDONESIA

Vol. 8 No. 3, September 2013

Pengelola Jurnal Kepariwisataan Indonesia

Pembina : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
2. Kepala Puslitbang Kebijakan Kepariwisataan

Pemimpin Umum : Drs. Isdaryono M.Si.
Pemimpin Editor : Drs. M. Sudjana
Wakil Pemimpin Editor : Ika Kusuma Permana Sari, SH. SE.ME

Editor Pelaksana : 1. Drs. Hendro Sewoyo, M. Hum.
2. Yeni Imaniar Hamzah, S. Hum.
3. Addin Maulana, S. ST. Par

Dewan Editor :

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, M.A. (Komunikasi dan Opini Publik)
2. Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. (Pariwisata Sejarah/Budaya)
3. Dr. Ir. A.A. P. Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc. (Pengembangan Destinasi)
4. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Kelembagaan dan *Community Based*)
5. Dr. M. Baiquni, M.A. (Geografi Pariwisata)
6. Ir. Kusmayadi, MM. (Agrowisata)
7. I Ketut Suryadiarta SP. MA. (Sosiologi Pariwisata)
8. Sugeng P. Syahrie, SS. MT. (Pariwisata Budaya)
9. Kiftiawati, SS. (Bahasa/Linguistik)
10. Dr. Yekti Maunati (Pariwisata Budaya)

Mitra Bestari : 1. Thomas Daniel Hurst, MA. (Pariwisata Minat Khusus)
2. Dr. Dyah Chitraria Liestyati KNP (Komunikasi Budaya / Pariwisata)
3. Drs. Ary Suhandi (Ekowisata)

Sekretariat : 1. Nurlaila, M.Si.
2. Ida Dhalia, B.A.
3. Unisah
4. Sri Rahayu
5. Intan Rulianti, S.Kom
6. Wahyu Hartono, SH
7. Ajeng Puspita TA, S.ST.Par

Terakreditasi dengan no. akreditasi 487/AU2/P2MI-LIPI/08/2012

Jurnal Kepariwisataan Indonesia (JKI) diterbitkan empat nomor dalam setahun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan, Badan Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jurnal Kepariwisataan Indonesia memuat hasil-hasil penelitian dan pengembangan, kajian, serta pemikiran dalam bidang kepariwisataan.

Jurnal Kepariwisataan Indonesia bertujuan menyebarluaskan data dan informasi hasil penelitian, kajian dan pemikiran para peneliti, perencana, praktisi, pengajar maupun para pembuat kebijakan dalam bidang kepariwisataan.

Redaksi menerima tulisan sesuai dengan misi jurnal. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah maknanya.

Alamat Redaksi:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
Badan Pengembangan Sumber Daya
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jl. Medan Merdeka Barat 17 Jakarta 10110, Gd. Sapta Pesona, Lantai 21
Telp. (021) 3838593, 3838587, Fax (021) 3810901, e-mail: jurnalpariwisata@gmail.com

Foto sampul : Upacara Keagamaan di Pura Ulun Danu, Bali (Faruk Alfian)

 ISSN : 1907-9419

DAFTAR ISI

	PENGANTAR REDAKSI	i
	DAFTAR ISI	iii-iv
	LEMBAR ABSTRAK	v-x
1	**PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA** Muhammad Afdi Nizar	227-240
2	**KAJIAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN WISATA PANTAI DI PANTAI PASIR PUTIH BIRA, BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN** Fachruddin Hari Anggara Putera, Achmad Fahrudin, Niken T M Pratiwi, Setyo Budi Susilo	241-254
3	**KERELAAN MEMBAYAR WISATAWAN DALAM MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN: KASUS DESA WISATA DI YOGYAKARTA** Joko Tri Haryanto	255-271
4	**POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI INTERAKTIF BAGI PARIWISATA INDONESIA** Yeni Imaniar Hamzah	273-285
5	**REKOMENDASI MODEL PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH MELALUI PENGUATAN LEMBAGA KEPARIWISATAAN** Mawardin M. Simpala, Bra Baskoro	287-303
6	**PENGARUH KEHARMONISAN-DIRI TERHADAP LOYALITAS DESTINASI DENGAN MODERASI PENGALAMAN KUNJUNGAN PADA TAMAN REKREASI DI JAKARTA UTARA** Rudyanto	305-321
7	**PENGELOLAAN SUMBER DAYA PARIWISATA DI DESA CANDIKUNING KABUPATEN TABANAN, BALI** Made Heny Urnila Dewi, Chafid Fandeli, Janianton Damanik, M. Baiquni	323-338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

DAFTAR ISI

8	**TINJAUAN BUKU** **Tentang Kepariwisataan Kumpulan Tulisanku Seputar Kepariwisataan Nasional** **Ditinjau oleh:** **Destha Titi Raharjana**	339-343
9	**BIO DATA PENULIS**	345-346
10	**PEDOMAN PENULISAN**	347-348

wonderful indonesia
www.indonesia.travel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

KAJIAN KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN WISATA PANTAI DI PANTAI PASIR PUTIH BIRA, BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN

Fachruddin Hari Anggara Putera[1], Achmad Fahrudin[2], Niken T M Pratiwi[3], Setyo Budi Susilo[4]

[1]Mahasiswa Pascasarjana Progam Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor,
[2]Ketua Komisi Pembimbing, Staf Pengajar Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Institut Pertanian Bogor,
[3]Anggota Komisi Pembimbing, Staf Pengajar Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Institut Pertanian Bogor,
[4]Staf Pengajar Program Studi Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Institut Pertanian Bogor

Abstract

The objectives of this research is to assess sustainability status of beach tourism management of Bira White Sand Beach, Bulukumba, South Sulawesi based on constructing a beach tourism management sustainability index (BTMSI).

The result of this study reveals that Rapbeachtour method (Rapid Appraisal of Beach Tourism) may be used as a method on appraising sustainability status of Beach Tourism Management. Rapbeachtour analysis show that BTMSI in Bira White Sand Beach, Bulukumba, South Sulawesi is 37,44. Thus sustainability status of beach tourism management of Bira White Sand Beach is not sustainability yet. Monte Carlo analysis method shows that indices from Rapbeachtour analysis are very stable. Leverage analysis reveals 2 indicator that are not sensitive to BTMSI.

Key words: beach tourism, Bira white sand beach, management sustainability study, Rapbeachtour

PENDAHULUAN

Pantai Pasir Putih Bira adalah pantai yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai ini terletak di 5°36'58,76" S-120° 27' 24,15" E, dan merupakan sentra wisata terbesar di Bulukumba (BAPPEDA Kabupaten Bulukumba, 2006).

Ada beberapa ciri yang menonjol pada pantai ini. Pertama, secara ekologi, Pantai Pasir Putih Bira memiliki pantai dengan garis pantai sepanjang 3,1 km dan hamparan pantainya berupa pasir putih dengan substrat yang sangat halus. Pantai Pasir Putih Bira juga memiliki lebar pantai mencapai 50 m. Kedalaman pantai berkisar 1-2 m dan kemiringannya tidak lebih dari 2,5°. Dengan demikian, pantai ini merupakan pantai yang landai sehingga sangat cocok untuk kegiatan wisata pantai. Di samping itu, perairan pantainya sangat cerah, dengan titik kecerahan mencapai 100%. Didukung oleh kecepatan arus berkisar 0,15 m/dt, vegetasi berupa kelapa dan lahan terbuka, serta tidak terdapat biota laut yang berbahaya membuat pantai ini sangat aman menjadi lokasi wisata.

Kedua, angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) ke Pantai Pasir Putih Bira menunjuKkan terjadi peningkatan setiap tahunnya, yaitu tahun 2008 sebesar 61.614 pengunjung, tahun 2009 sebesar 69.700 pengunjung, tahun 2010 sebesar 89.900 pengunjung, tahun 2011 sebesar 90.100 pengunjung, dan tahun 2012 sebesar 95.970 pengunjung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2012b). Hal ini memperlihatkan bahwa Pantai Pasir Putih Bira memiliki potensi pengunjung yang besar.

Ketiga, besarnya angka kunjungan wisatawan memberikan dampak bagi pendapatan daerah. Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa pendapatan daerah pun meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tahun 2008 memberikan masukan pendapatan daerah sebesar Rp. 165.300.000, tahun 2009 sebesar Rp. 190.400.000, tahun 2010 sebesar Rp. 224.500.000, tahun 2011 sebesar Rp. 230.000.000, dan tahun 2012 sebesar Rp. 233.450.000 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2012c).

Keempat, anggaran pendanaan pun meningkat, yakni dari Rp. 190.000.000 pada tahun 2012 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2012a) menjadi Rp. 386.000.000 pada tahun 2013 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2013). Hal ini menunjukan bahwa Pantai Pasir Putih Bira cukup mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah untuk dikelola.

Namun, potensi yang sangat besar tersebut tidaklah cukup untuk menjamin pantai ini menjadi pantai yang berpotensi secara berkelanjutan, karena kenyataan menunjukan bahwa saat ini kondisi Pantai Pasir Putih Bira sangatlah berpotensi untuk tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal berikut. Pertama, kondisi Pantai Pasir Putih Bira saat ini cukup kotor. Hal ini terlihat dari adanya sampah-sampah yang terdapat di hamparan pantai. Kedua, penataan kawasan wisata pantai yang masih belum teratur. Hal ini dapat dilihat dari adanya warung-warung di pinggir pantai dan perahu-perahu nelayan yang terparkir di kawasan wisata pantai yang masih belum teratur. Ketiga, tidak ada batasan jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata pantai. Jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata pantai yang melebihi daya dukung kawasan dapat menjadi penyebab wisata pantai tersebut tidak berkelanjutan. Keempat, kurangnya partisiPasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan wisata pantai berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya daya kreativitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa untuk diperjualbelikan dalam mendukung kegiatan ekonomi wisata pantai. Dengan potensi yang sangat besar dan permasalahan yang ada tersebut, maka pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira ini perlu dievaluasi keberlanjutannya.

Pengelolaan wisata pantai harus mengacu kepada kaidah pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi keberlanjutan pengelolaan wisata pantai juga harus mengacu kepada kaidah pembangunan berkelanjutan. Kriteria pembangunan yang berkelanjutan pada prinsipnya adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mencakup berbagai dimensi (multidimensi) pembangunan serta dilaksanakan secara terpadu (Susilo, 2003). Dahuri *et al.* (2008) dan

Bengen (2004) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki empat dimensi, yaitu ekologi, sosial ekonomi, sosial politik, dan hukum dan kelembagaan. Cincin-Sain & Knecht (1998) dan Yulianda *et al.* (2010) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi tiga dimensi, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. OECD (1993) mencatat bahwa selain dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi, perlu juga dipertimbangkan dimensi moral dan kelembagaan. Sebenarnya yang terpenting dalam menilai keberlanjutan pengelolaan bukanlah terletak pada jumlah pengelompokan dimensi pembangunan tersebut tetapi seberapa banyak indikator pembangunan pada setiap dimensi pembangunan yang dapat digunakan untuk menangkap kondisi masing-masing dimensi tersebut dan dapat digunakan untuk menilai status keberlanjutan pengelolaan tersebut (Susilo, 2003). Dengan demikian, di dalam tesis ini berbagai indikator evaluasi keberlanjutan pengelolaan wisata pantai dikelompokan menjadi empat dimensi yaitu ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Salah satu alternatif metode yang dapat digunakan untuk evaluasi status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai secara multidimensi adalah menggunakan metode Rapbeachtour (*Rapid Appraisal of Beach Tourism*). Rapbeachtour merupakan pengembangan dari metode Rapfish (*Rapid Appraisal of Fisheries*). Metode Rapfish dikembangkan oleh Pitcher *et al.* (1998) dan terus disempurnakan dan diaplikasikan untuk menilai keberlanjutan pembangunan perikanan tangkap (Pitcher & Preikshot, 2001; Kavanagh, 2001; Alder *et al.* 2002; Fauzi & Anna, 2002). Penelitian ini mencoba mengaplikasikan pendekatan Kapbeachtour dalam mengevaluasi keberlanjutan pengelolaan wisata pantai dengan mengambil studi kasus di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah menilai keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan melalui penyusunan indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai dan mendeterminasi tingkat kemajuan maupun ketertinggalan dari setiap indikator-indikator dimensi pengelolaan untuk digunakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2012 dan pada bulan Juli sampai Agustus 2012 di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Gambar 1).

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Data kondisi ekologi berupa kebersihan pantai, kesesuaian kawasan, daya dukung kawasan, dan penataan kawasan. Data kondisi sosial berupa partisipasi masyarakat, peran pemerintah, peran swasta, dan kearifan lokal. Data kondisi ekonomi berupa kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, sumber pendanaan, dan anggaran pendanaan. Data kondisi kelembagaan berupa keberadaan lembaga, peran lembaga, ketersediaan peraturan dan penegakkan peraturan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data tersebut

9419
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

menggunakan kombinasi beberapa metode, yaitu wawancara, pengamatan langsung di lapangan, pengukuran langsung di lapangan, dan studi kepustakaan. Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling* (Satria *et al.*, 2002).

Metode Analisis Data

Analisis keberlanjutan pengelolaan wisata pantai ini menggunakan metode Rapbeachtour (*Rapid Appraisal of Beach Tourism*). Metode Rapbeachtour berupa metode penilaian indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing dimensi pengelolaan wisata pantai berkelanjutan. Dimensi-dimensi yang terkait dengan pengelolaan wisata pantai berkelanjutan dalam penelitian ini meliputi dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Hasil analisis dari indikator-indikator tersebut berupa status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai. Status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai tersebut yang menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan. Secara ringkas metode Rapbeachtour dapat diuraikan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, penentuan kajian penelitian dalam hal ini kajian keberlanjutan

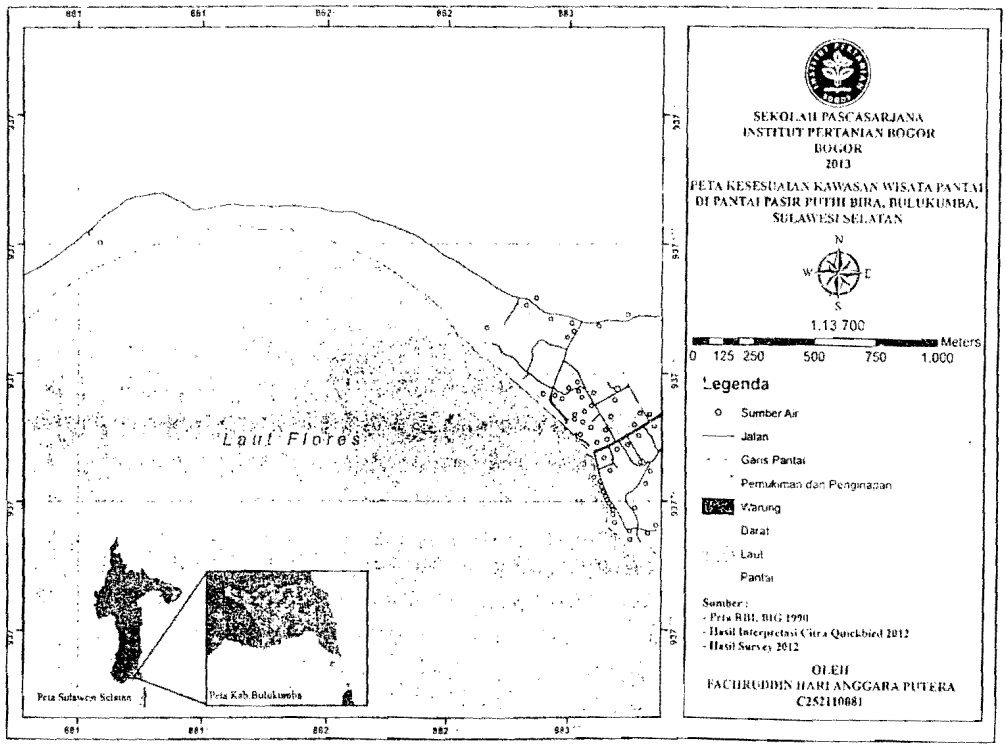

Gambar 1. Peta lokasi penelitian: Pantai Pasir Putih Bira

pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kedua, penentuan indikator keberlanjutan pengelolaan yakni indikator yang dapat merepresentasikan pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan yang mencakup empat dimensi pengelolaan yaitu dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan (Ross & Wall, 1999; Bjork, 2000; Hall, 2001; Wood, 2002). Dimensi ekologi menggambarkan tatanan sistem lingkungan yang dapat mendukung berlangsungnya pengelolaan wisata pantai secara berkelanjutan. Indikator yang dianalisis dalam dimensi ekologi adalah kebersihan pantai, kesesuaian kawasan, daya dukung kawasan, dan penataan kawasan. Dimensi sosial mencerminkan sistem sosial manusia yang dapat mendukung berlangsungnya pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan. Indikator yang dianalisis dalam dimensi sosial adalah partisipasi masyarakat, peran pemerintah, peran swasta, dan kearifan lokal. Dimensi ekonomi mencerminkan bagaimana sumber pendanaan kawasan, apakah dapat mendukung berlangsungnya pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan, serta bagaimana hasil pemanfaatan kawasan wisata pantai, apakah memperoleh hasil yang secara ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendapatan bagi daerah. Indikator yang dianalisis dalam dimensi ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, sumber pendanaan dan anggaran tahunan. Dimensi kelembagaan merupakan cerminan dari sistem kelembagaan yang dapat mendukung berlangsungnya pengelolaan wisata pantai secara berkelanjutan. Indikator yang dianalisis dalam dimensi kelembagaan adalah keberadaan lembaga, peran lembaga, ketersediaan peraturan, dan penegakkan peraturan.

Ketiga, penentuan nilai untuk setiap indikator dalam skala ordinal yang mencerminkan realitas kondisi lokasi penelitian. Keempat, ordinasi Rapbeachtour (*multidimensional scaling*) untuk setiap indikator. Kelima, penentuan status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai berdasarkan indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai. Keenam analisis *Monte Carlo* untuk melihat kestabilan indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai dan analisis *Leverage* untuk melihat peran setiap indikator terhadap indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai. Ketujuh, penyusunan rekomendasi pengelolaan wisata pantai berkelanjutan berdasarkan indikator yang sensitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Rapbeachtour menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira adalah 37,44 (Gambar 2). Dengan demikian status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira adalah kurang berkelanjutan karena masuk dalam selang 26-50 (Tabel 1). Hasil penilaian (pemberian skor) dan acuannya pada setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 2.

Hasil analisis monte carlo menunjukkan bahwa indeks pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira sangat stabil yang ditunjukkan oleh plot yang mengumpul (Gambar 3).

Pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan tersebut kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

berkelanjutan karena terjadi ketimpangan antar dimensi pengelolaan. Analisis Rapbeachtour pada setiap dimensi menunjukkan bahwa dimensi sosial merupakan dimensi yang paling lemah diantara semua dimensi yang dipertimbangkan (Gambar 4). Dimensi sosial tersebut baru mencapai nilai indeks 19,94 yang berarti status keberlanjutannya buruk, disusul dimensi ekologi dengan nilai 26,63 yang berarti status keberlanjutannya kurang, kemudian dimensi kelembagaan dengan nilai 33,00 yang berarti status keberlanjutannya juga masih kurang, dan hanya satu dimensi yang keberlanjutannya baik yaitu dimensi ekonomi dengan nilai 72,60 (Tabel 3). Dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan harus seimbang didalam pengelolaan berkelanjutan (Bengen, 2003). Jika mempertimbangkan hal tersebut maka pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira masih dalam status kurang berkelanjutan.

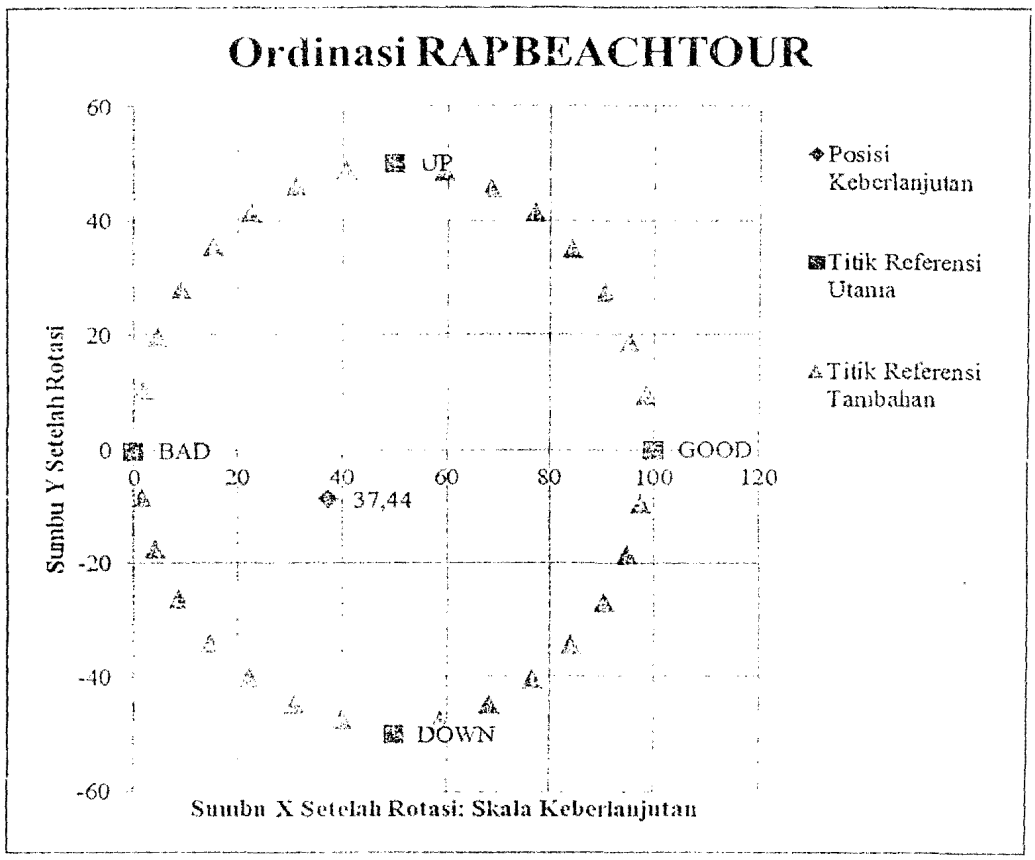

Gambar 2. Indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan

Tabel 1. Kategori status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai berdasarkan IKPWP (Sumber: Susilo, 2003)

IKPWP	Kategori status keberlanjutan
0-25	Buruk
26-50	Kurang
51-75	Cukup
76-100	Baik

Tabel 2. Realitas nilai untuk setiap indikator

Dimensi dan Indikator	Keterangan	Nilai
Dimensi Ekologi		
Kebersihan pantai	0=<bersih; 1=cukup bersih; 2=bersih	0
Kesesuaian kawasan	0=tidak sesuai; 1=sesuai; 2=sangat sesuai	2
Daya dukung kawasan	0=(>DDK); 1=(=DDK); 2=(<DDK)	0
Penataan kawasan	0=<tertata; 1=cukup tertata; 2=tertata	0
Dimensi Sosial		
Partisipasi masyarakat	0=rendah; 1=cukup; 2=tinggi	0
Peran pemerintah	0=rendah; 1=cukup; 2=tinggi	0
Peran swasta	0=rendah; 1=cukup; 2=tinggi	1
Kearifan lokal	0=rendah; 1=cukup; 2=tinggi	0
Dimensi Ekonomi		
Kesejahteraan masyarakat	0=menurun; 1=tetap; 2=meningkat	2
Pendapatan daerah	0=menurun; 1=tetap; 2=meningkat	2
Sumber pendanaan	0=kurang; 1=cukup; 2= banyak	0
Anggaran pendanaan	0=menurun; 1=tetap; 2=meningkat	2
Dimensi Kelembagaan		
Keberadaan lembaga	0=kurang; 1=cukup; 2=banyak	1
Peran lembaga	0=rendah; 1=cukup; 2=tinggi	1
Ketersediaan peraturan	0=kurang; 1=cukup; 2=banyak	0
Penegakkan peraturan	0=rendah; 1=cukup; 2=tinggi	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

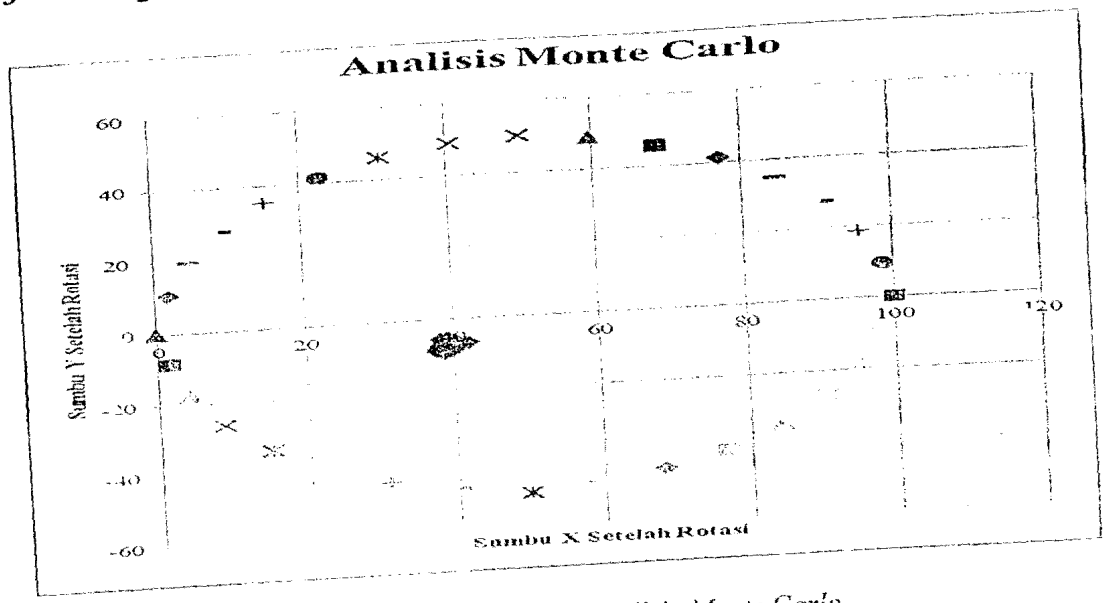

Gambar 3. Hasil analisis *Monte Carlo*

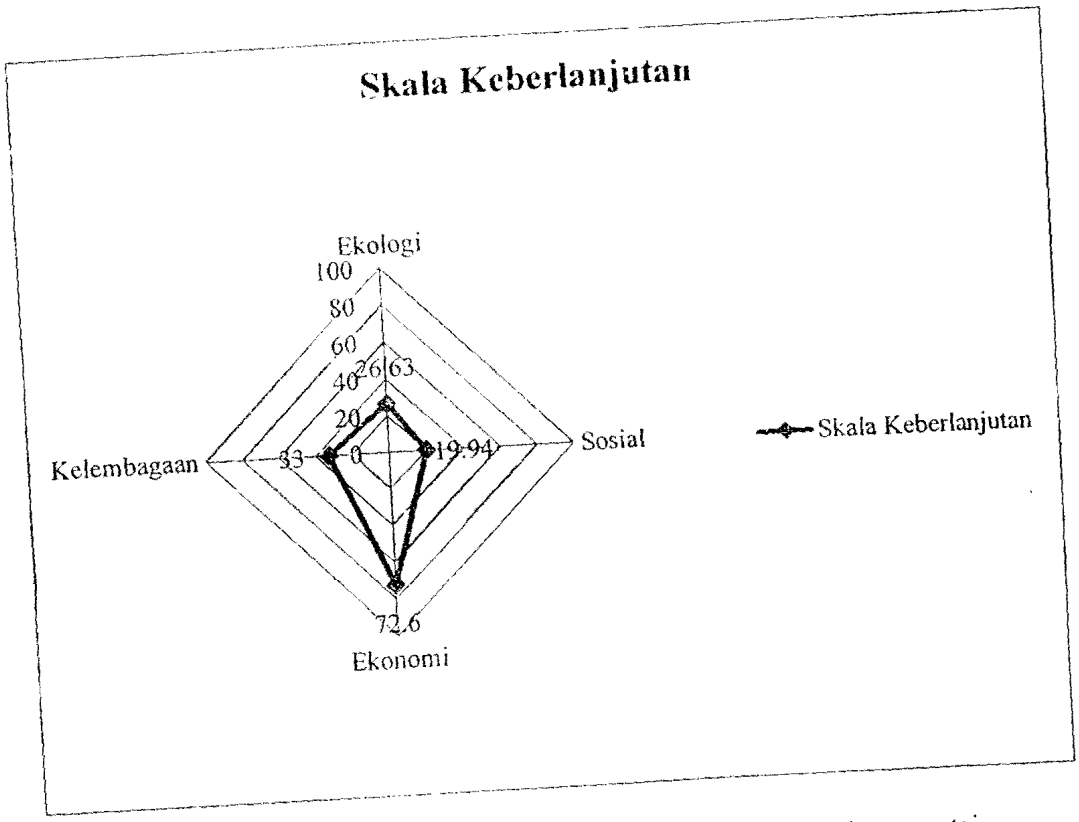

Gambar 4. Diagram layang indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Tabel 3. Indeks dan status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada setiap dimensi pengelolaan

Dimensi	Indeks keberlanjutan	Status keberlanjutan
Ekologi	26,63	Kurang
Sosial	19,94	Buruk
Ekonomi	72,60	Baik
Kelembagaan	33,00	Kurang

Nilai skor pada indikator-indikator yang masuk dalam dimensi sosial, ekologi, dan ekonomi memang cenderung buruk. hanya satu indikator yang memiliki nilai skor yang baik, yaitu dimensi ekonomi.

Pada dimensi sosial, salah satu indikator yang kondisinya masih buruk adalah partisipasi masyarakat. Hasil analisis menunjukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Partisipasi masyarakat memperoleh pengaruh rendah karena partisipasi masyarakat tersebut belum memberikan manfaat yang cukup signifikan untuk pengembangan kawasan wisata pantai. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan suatu produk untuk diperjualbelikan dalam mendukung kegiatan ekonomi wisata pantai. Sebagai contoh, sebagian besar produk yang diperjualbelikan bukan berasal dari produk hasil cipta masyarakat setempat seperti baju bali, sarung bali, dan benda-benda pernak-pernik lainnya yang rata-rata berasal dari Bali. Padahal, sebenarnya tidak sedikit kearifan masyarakat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif, seperti pembuatan kapal pinisi yang sangat terkenal hingga ke mancanegara, dan pembuatan sarung sutra bulukumba, yang jika dikembangkan akan menciptakan produk yang tidak kalah bersaing dengan produk dari luar. Kurang berkembangnya partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan kearifan-kearifan yang ada.

Pada dimensi ekologi, salah satu yang kondisi indikatornya masih buruk adalah daya dukung kawasan. Daya dukung kawasan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira adalah 124 orang per hari atau jika di konversi ke tahun menjadi 45.260 orang per tahun. Dengan demikian, jika melihat pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan dalam lima tahun terakhir (jumlah pengunjung: tahun 2008 = 61.614 orang per tahun, tahun 2009 = 69.700 orang per tahun, tahun 2010 = 89.800 orang per tahun, tahun 2011 = 90.100 orang per tahun, tahun 2012 = 95.970 orang per tahun), maka jumlah wisatawan di Pantai Pasir Putih Bira telah melebihi daya daya dukung kawasan. Jumlah wisatawan di Pantai Pasir Putih Bira telah melebihi daya dukungnya disebabkan oleh beberapa hal berikut.

Pertama, kawasan Pantai Pasir Putih Bira tidak memiliki aturan mengenai batasan jumlah pengunjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

yang dapat ditampung setiap harinya. Hal ini tentunya mengakibatkan siapa saja dan kapan saja boleh masuk ke Pantai Pasir Putih Bira yang dampaknya mengakibatkan jumlah pengunjung akan melebihi daya dukung kawasan.

Kedua, tidak adanya aturan ini disebabkan karena kawasan Pantai Pasir Putih Bira dimanfaatkan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang ada.

Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, aparat pemerintah, maupun sektor swasta mengenai daya dukung kawasan terkait dengan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata pantai.

Pada dimensi kelembagaan, salah satu indikator yang kondisinya juga masih buruk adalah ketersediaan peraturan. Hal ini karena peraturan yang ada baru berjumlah 2, yang ditetapkan lewat peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir. Padahal melihat kondisi pengunjung kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bira saat ini yang telah melebihi daya dukung kawasan, maka salah satu Perda yang perlu dibuat yaitu Perda mengenai batasan jumlah wisatawan. Disamping Perda pembatasan jumlah wisatawan, Perda lainnya yang perlu diperhatikan untuk dibuat yaitu Perda mengenai keterlibatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat yang masih rendah. Perlu peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat guna menunjang kegiatan wisata pantai.

Pada dimensi ekonomi, satu-satunya indikator yang belum masuk dalam kategori baik adalah sumber pendanaan. Berdasarkan data yang diperoleh, sumber dukungan dana untuk kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bira hanya berasal dari satu sumber, yakni berasal dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bulukumba. Hal ini menyebabkan anggaran untuk pengelolaan kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bira masih sangat terbatas. Dengan demikian berdampak pada sasaran penggunaan anggaran yang juga masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang lebih diarahkan pada pemeliharaan dan pembagunan fasilitas aset Pemerintah Daerah.

Hasil analisis *Leverage* memperlihatkan bahwa diantara 16 indikator yang digunakan untuk menilai status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, terdapat 14 indikator yang paling sensitif, yaitu berturut-turut adalah kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, anggaran pendanaan, kearifan lokal, peran pemerintah, partisipasi masyarakat, sumber pendanaan, penataan kawasan, daya dukung kawasan, peran swasta, keberadaan lembaga, peran lembaga, ketersediaan peraturan, dan kebersihan pantai. Hanya terdapat 2 indikator yang tidak sensitif terhadap pembentukan indeks keberlanjutan pengelolaan wisata pantai, yaitu kesesuaian kawasan wisata pantai dan penegakan peraturan (Gambar 5).

Empat belas indikator yang paling sensitif ini hendaknya mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan pengelolaan wisata pantai di Pantai

Pasir Putih Bira. Kebijakan yang diambil pada dasarnya adalah kebijakan mempertahankan nilai indikator apabila telah baik dan memperbaiki nilai indikator apabila belum baik (Gambar 6).

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan untuk dapat meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira adalah sebagai berikut.

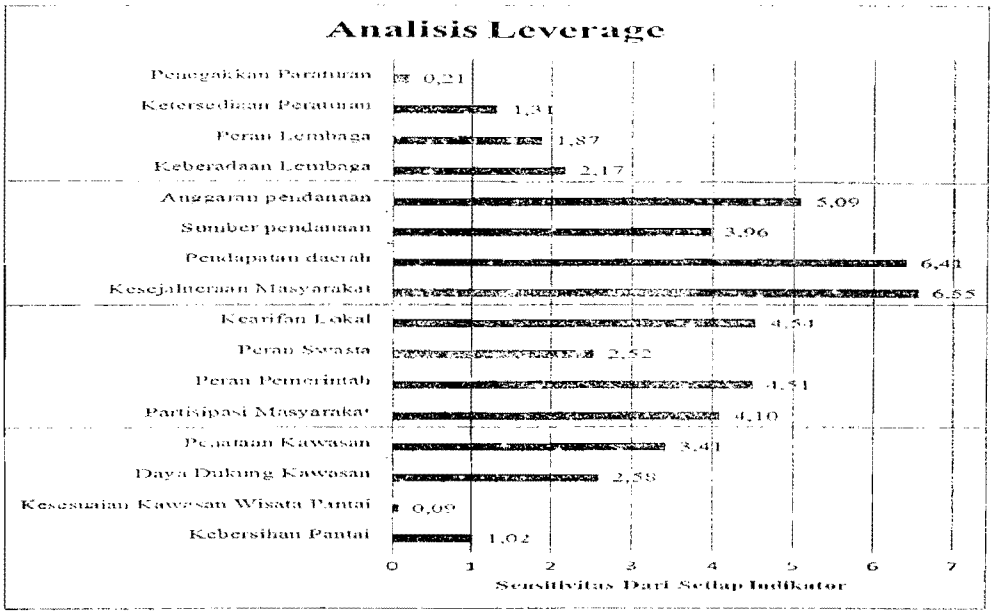

Gambar 5. Hasil analisis *Leverage*

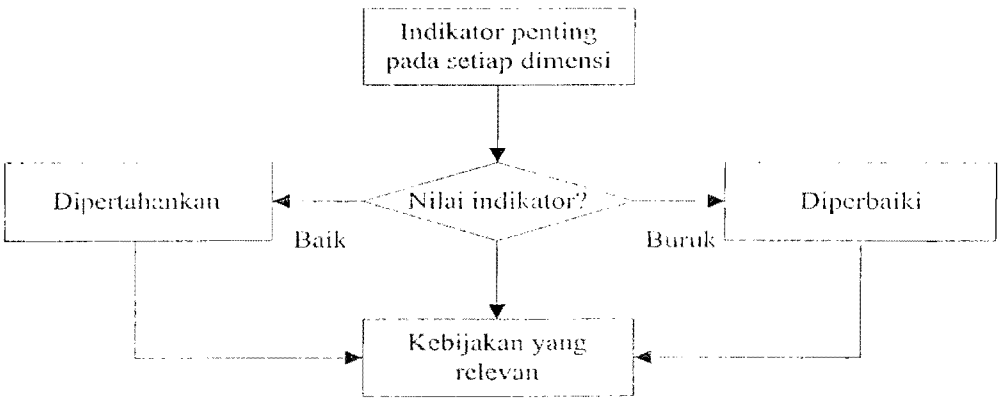

Gambar 6. Determinasi indikator penting dalam kerangka pembuatan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Pertama, membuat kebijakan pembatasan jumlah pengunjung kawasan. Dalam hal ini pengunjung kawasan ideal dalam 1 hari adalah 124 orang. Dampak positifnya adalah secara ekologi akan menjamin keberlanjutan kawasan wisata pantai. Namun dampak negatifnya adalah pengurangan pendapatan masyarakat dan daerah. Dengan demikian, maka untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif ini, perlu dibuat beberapa kebijakan yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Kebijakan tersebut antara lain: a. membuat produk dan jasa yang dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan, misalnya jasa rekreasi, akomodasi, kerajinan, dan makanan; b. Meminimalkan kebocoran pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan lokal; c. Menyediakan pilihan akomodasi lokal; d. Menyediakan pilihan kegiatan rekreasi; e. Mendorong pertumbuhan konsumsi makanan lokal; f. Memastikan adanya program bagi hasil dari penerimaan kegiatan wisata pantai kepada pemerintah daerah.

Kedua, membuat aturan mengenai penataan kawasan dan meningkatkan kebersihan pantai melalui penyediaan sarana dan prasarana kebersihan pantai dan petugas kebersihan pantai. Melalui peraturan tersebut, maka nilai kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bira akan meningkat. Dengan demikian, tarif yang cukup besar dapat dikenakan kepada pengunjung kawasan untuk kegiatan yang bersifat ekonomi. Hal ini tidak akan memberikan rasa beban kepada pengunjung untuk mengeluarkan biaya wisatanya karena telah dipenuhi rasa senang dan kagum karena dapat menikmati keindahan dan kebersihan Pantai Pasir Putih Bira. Keindahan dan kebersihan pantai ini yang merupakan nilai jual kawasan ini. Akibatnya akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Ketiga, membuat kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, misalnya untuk jasa pemandu wisata, pengembangan usaha kecil menengah dibidang kerajinan, pakaian, dan makanan, serta pengembangan usaha kegiatan olahraga air.

Keempat, mengembangkan pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal, khususnya keterampilan yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan wisata pantai. Kelima, mengembangkan acara atau festival bernuansa lokal. Keenam, membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk merayakan tradisi budaya mereka.

Ketujuh, meningkatkan peran pemerintah dalam mendukung kegiatan wisata pantai, misalnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan wisata pantai, akses jalan diperbaiki, dukungan anggaran, dan penyediaan petugas keamanan dan kebersihan pantai.

Kedelapan, membuat aturan yang dapat menunjang dan memperkuat pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan, misalnya aturan yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat, aturan yang dapat membuat penataan kawasan menjadi lebih teratur, dan aturan mengenai batasan jumlah pengunjung kawasan agar pengunjung dapat menikmati keindahan dan kenyamanan kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

yang lebih baik. Kesembilan, meningkatkan promosi potensi kawasan agar dapat menarik investor dan lembaga-lembaga lainnya dalam mendukung pengelolaan kegiatan wisata pantai dan pengembangan objek wisata pantai.

Kesepuluh, meningkatkan peran lembaga yang telah ada, misalnya membantu promosi kawasan, memberikan upah karyawan minimal sesuai standar UMP Sulawesi Selatan, dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai yang berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan termasuk kategori kurang berkelanjutan. Untuk meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira, perlu dibuat beberapa kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi status keberlanjutan pengelolaan. Pertama, menetapkan daya dukung kawasan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Bira. Kedua, membuat rencana tata ruang kawasan dan meningkatan kebersihan pantai. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, peran swasta, dan kearifan lokal masyarakat. Keempat, mencari lembaga yang dapat mendukung pengelolaan kawasan wisata pantai tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Kelima, membuat peraturan daerah (Perda) yang dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan wisata pantai, misalnya Perda tentang penetapan daya dukung kawasan, Perda tentang penataan kawasan, dan Perda tentang keterlibatan masyarakat didalam pengelolaan kawasan wisata pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Alder, J., D. Zeller, T. Pitcher, dan R. Sumaila. (2002). A method for evaluating marine protected area management. *Coastal Management*, No. 30: 121-131.

[BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba. (2006). Data potensi sumberdaya daerah Kabupaten Bulukumba. BAPPEDA Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.

Bengen, D.G. (2003). Format keterpaduan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Warta Pesisir dan Lautan*, No. 01: 3-6.

Bengen, D.G. (2004). Sinopsis "ekosistem dan sumberdaya alam pesisir dan laut serta prinsip pengelolaannya". Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan laut Institut Pertanian Bogor. Bogor. 72p.

Bjork, P. (2000). Ecotourism from a conceptual perspective, an extended definition of a unique tourism form. *International Journal of Tourism Research*, 2: 189-202.

Cicin-Sain B & Knecht. (1998). Integrated coastal and ocean management: concept and practices. Island Press, Washington.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, SP., & Sitepu, MJ. (2008). Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. PT Pradnya Paramitha. Jakarta. 328p.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. (2012a). Alokasi anggaran dana Pantai Pasir Putih Bira tahun anggaran 2012. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. (2012b).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University

Angka kunjungan wisatawan Pantai Pasir Putih Bira 5 tahun terakhir (2008-2012). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. (2012c). Pendapatan daerah melalui retribusi parkir dan retribusi tiket masuk di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Bira tahun 2008 sampai tahun 2012. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. (2013). Alokasi anggaran dana Pantai Pasir Putih Bira tahun anggaran 2013. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.

Fauzi, A. Dan S. Anna. (2002). Evaluasi status keberlanjutan pembangunan perikanan: Aplikasi pendekatan Rapfish (Studi kasus perairan pesisir DKI Jakarta). *Jurnal Pesisir dan Lautan*, Vol. 4: 43-55.

Hall, C.M. (2001). Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier? *Ocean & Coastal Management*, 44: 601-618.

Kavanagh, P. (2001). Rapid Appraisal of Fisheries (Rapfish) Project. Rapfish Software Description (for Microsoft Excel). University of British Columbia, Fisheries Center, Vancouver.

Pitcher, T. A., A. Bundy, D. Preikshot, T. Hutton, dan D. Pauly. (1998). Measuring the unmeasurable: A multivariate and interdisciplinary method for rapid appraisal of the health of fisheries. *in* Pitcher, T. J., P. Hart, dan D. Pauly (editor): Reinventing Fisheries Management. Kluwer, London. Hal.: 31-54.

Pitcher TJ & Preikshot D. (2001). RAPFISH: A rapid appraisal technique to evaluate the sustainability status of fiheries. *Fisheries Research*, 49: 255-270.

Ross, S & Wall, G. (1999). Ecotourism: towards congruence between theory and practice. *Tourism Management*, 20: 123-132.

Satria, A., Umbari, A., Fauzi, A., Purbayanto, A., Sutarto, E., Muchsin, I., Muflikhati, I., Karim, M., Saad, S., Oktariza, W., & Imran, Z. (2002). Acuan singkat menuju desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan. Pusat Kajian Agraria IPB, Partnership for Governance Reform in Indonesia, PT Pustaka Cidesindo. Jakarta Selatan. 96p.

Susilo, S.B. (2003). Keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil: Studi kasus kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pari Kepulauan Seribu [disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 233p.

Wood, M.E. (2002). Ecotourism: principles, practices and policies for sustainability. UNEP dan TIES UN Publications.

Yulianda, F., Fahrudin, A., Hutabarat, A.A., Harteti, S., Kusharjani., Kang, H.S., & Adrianto, L. (2010). Pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu. Pusdiklat Kehutanan-Departemen Kehutanan RI, SECEM-Korea International Cooperation Agency. Bogor. 134p.

OECD. (1993). Coastal zone management: Integrated polices. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University